

Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah

(Studi Tentang Seleksi Kandidat di Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilukada

Kota Tasikmalaya Tahun 2017)

Teguh Anggoro¹, Tina Cahya Mulyatin², Triono³

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar

³ FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang

goeh_an77@yahoo.co.id; tinacahya@gmail.com; triono.sr@gmail.com

Abstrak

Rekrutmen calon kepala daerah merupakan bagian dari proses politik di internal partai dalam menghadapi Pemilukada. Seleksi kandidat merupakan “*secret garden*” bagi setiap partai, selain itu proses seleksi terkadang mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar partai politik. Demikian juga yang terjadi pada proses seleksi kandidat bakal calon kepala daerah di DPD PKS pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana metode seleksi dalam rekrutmen politik calon kepala daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya 2017, Faktor apa yang mempengaruhi perubahan pengambilan keputusan bakal calon kepala daerah oleh PKS”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis seleksi kandidat, serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan pengambilan keputusan bakal calon kepala daerah dari PKS. Hasil penelitian ini menjelaskan seleksi pada PKS ditentukan oleh elit partai. Pada tataran lokal seleksi terlihat demokratis sedangkan pada tataran DPW dan DPP sangat dipengaruhi oleh elit partai dengan model seleksi yang tertutup. secara umum proses seleksi kandidat pada PKS menunjukkan derajat non demokratis.

Kata Kunci: *Partai Politik; Rekrutmen Politik; Seleksi Kandidat; Pemilu;*

Abstract

Recruitment of regional head candidates is part of the political process in the internal party in dealing with the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for each party, besides the selection process is sometimes easily influenced by other forces outside political parties. Likewise, what happened in the selection process of candidates for regional head candidates in the DPD PKS at the Regional Election in Tasikmalaya City in 2017. This study was to answer the research question "What is the selection method in political recruitment of regional head candidates by the Prosperous Justice Party at the Regional Election in Tasikmalaya City 2017, What factors influence changes in the decision making of prospective regional heads by PKS ". This study aims to describe, analyze the selection of candidates, and explain the factors that influence the decision making of prospective regional head candidates from PKS. The results of this study explain the selection of PKS determined by party elites. At the local level the selection looks democratic while at the level of the DPW and DPP is strongly influenced by the party elite with a closed selection

model. in general the candidate selection process at PKS shows non-democratic degrees.

Keyword: *Political Parties; Political Recruitment; Candidate Selection; Elections;*

Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung yang tengah berlangsung hampir di seluruh penjuru tanah air, merupakan suatu langkah maju dalam berdemokrasi. Setelah berhasil menyelenggarakan Pemilu Nasional 2004 dengan damai dan demokratis, bangsa Indonesia kemudian melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada) mulai 2005 (Subekti, 2015).

Dalam Pemilukada melibatkan rakyat suatu daerah, untuk menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan. Proses ini layak mendapatkan dukungan semua pihak terutama warga masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan sesungguhnya. Sebagai negara yang masih belajar demokrasi (*beginner in democracy*), seluruh rakyat Indonesia mesti menghargai seluruh proses yang telah dilakukan. Hanya saja diperlukan perbaikan kualitas dalam setiap pelaksanaannya, sehingga demokrasi akan tetap terjaga di Indonesia.

Menjelang Pemilukada, selalu terdapat proses yang dilakukan

oleh partai politik dalam menentukan bakal calon yang akan diusung sebagai kandidat kepala daerah. Partai bisa mengajukan kandidat dari partai sendiri, atau partai mengajukan kandidat dari luar partainya, semua merupakan perhitungan politik dari masing-masing partai. Semua kegiatan di atas merupakan bagian dari rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Di dalam proses rekrutmen politik calon kepala daerah, terdapat proses seleksi kandidat. Menurut Hazan dan Rahat (2006) seleksi kandidat adalah salah satu hal pertama yang harus dilakukan partai politik sebelum pemilu berlangsung (Hazan & Rahat, 2006).

Seleksi calon juga merupakan arena penting dalam proses rekrutmen. Seleksi calon juga merupakan arena penting bagi perebutan kekuasaan internal partai (Hazan & Rahat, 2006).

Jika sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka terhadap umum (Hyun-Chool Lee, 2002), maka masyarakat yang berminat bisa mengikuti seleksi, biasanya elit-elit

daerah yang lebih berminat karena ini salah satu kunci untuk mendapat dukungan dari partai politik.

Dalam proses rekrutmen politik seharusnya individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik (Pamungkas, 2011). Fungsi rekrutmen ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Schattschneider dalam Norris menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini, maka ia berhenti menjadi partai politik (Pippa, 2006). Sedangkan menurut Firmanzah Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan sebagai pencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya,

perlu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi dan partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin - pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik (Firmanzah, 2011).

Tahapan rekrutmen juga ditentukan siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya. Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif, dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga

eksekutif dan legislative (Pippa, 2006).

Menurut Rahat seleksi kandidat di internal parpol adalah saudara kembar dari pemilihan umum yang diikuti oleh parpol. Demokrasi memiliki makna yang universal, baik di tingkatan sistem politik, maupun di tingkatan internal parpol. Pada satu sisi, partai politik berkompetisi dalam pemilu yang demokratis. Pada sisi yang lain, parpol melakukan proses kandidasi secara internal. Dengan demikian,

proses kandidasi dan pemilihan umum juga harus diperlakukan sama. Pada Pemilu Kota Tasikmalaya tahun 2017, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan calon walikota dan wakil walikota Tasikmalaya dari luar kader partai. Padahal pada awal proses rekrutmen, PKS melakukan seleksi terhadap sembilan orang kandidat melalui Pemilu Internal/Pemilu Raya di DPD PKS Kota Tasikmalaya.

Tabel 1. Hasil Pemilu Internal PKS Dalam Merekrut Bakal Calon Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017

NAMA	JUMLAH SUARA
Heri Ahmadi, S.Pdi	36
Yadi Mulyadi, SH	23
Tono Wartono	22
Ade Ruhimat S.IP	11
Dede Muharam	9
Isaq Farid, S.Pd	2
Ahmad Agus Subagyo, S.Ag	2
Dede, S.IP	2
Ade Aspahani, Lc	1

Sumber : DPD PKS Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Terdapat sembilan nama kader DPD PKS Kota Tasikmalaya yang muncul dalam pemilu raya yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kota Tasikmalaya. Dari sembilan kandidat tersebut, H. Heri Ahmadi, S.Pdi. mendapatkan suara terbanyak yaitu 36 suara. Pada akhirnya DPP

PKS memberikan rekomendasi kepada H Heri Ahmadi sebagai bakal calon internal dari DPD PKS Kota Tasikmalaya. Akan tetapi walaupun H Heri Ahmadi mendapatkan rekomendasi dari DPP PKS sebagai calon internal, ternyata pada saat pengajuan bakal calon wali kota dan

wakil wali kota Tasikmalaya, DPD PKS mengajukan H Dede (Incumben Wakil Walikota Tasikmalaya) dan dr Asep (dokter di RSUD Kota Tasikmalaya). Sedangkan H Heri Ahmadi, tidak jadi diajukan oleh DPD PKS.

PKS telah merubah pilihan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang justru bukan berasal dari partainya, ini menandakan keputusan yang diambil DPP PKS dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga tidak mengindahkan hasil Pemilu Raya dalam internal PKS. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi maka akan di jelaskan melalui analisis penelitian ini.

Penelitian ini penting diteliti karena mengisi celah penelitian rekrutmen dan seleksi kandidat. Penelitian ini menjawab rumusan masalah 1). Bagaimana metode seleksi dalam rekrutmen politik calon kepala daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya 2017. 2). Faktor apa yang mempengaruhi perubahan pengambilan keputusan bakal calon kepala daerah oleh PKS? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

dan menganalisis metode seleksi yang dilakukan oleh PKS saat melaksanakan kandidasi pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 2017. Selain itu akan menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan pengambilan keputusan bakal calon kepala daerah.

Metode

Penelitian ini dilakukan di kota Tasikmalaya Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yaitu studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau *setting* kontemporer (Creswell, 2014).

Dalam hal ini menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan - pertanyaan dan prosedur - prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna

data, Creswell (Creswell & Pianno, 2007).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada metode seleksi PKS dalam menentukan bakal calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya tahun 2017.

Pembahasan

Partai Politik

Kajian tentang partai politik merupakan salah satu bidang yang paling penting dan menarik dalam ilmu politik. Kajian tentang partai politik dikembangkan oleh para pakar sejak kuartal ketiga abad ke 19 (Scarrow, 2006).

Pada periode ini terdapat beberapa kajian tentang partai politik, terutama sebagai jawaban / respons terhadap cepatnya perkembangan peranan partai politik di pemerintahan (Scarrow, 2006).

Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, perkembangan baru terjadi ketika kajian tentang partai politik mulai membahas partai sebagai organisasi ekstra - parlementer. Seiring perkembangan zaman lambat laun partai politik sudah mengarah pada

partai modern, dengan mengembangkan manajemen organisasi. Partai politik modern, ini merupakan suatu era di mana permulaan bidang kajian di era modern (Noor, 2015).

Setelah itu diikuti oleh kajian yang lebih berpengaruh seperti dari Robert Michels Kajian tentang partai politik berlanjut dengan berbagai fokus baru kajian dan melahirkan lebih banyak teori yang lebih maju yang dikembangkan oleh para pakar. Pokok bahasan mulai berkembang seperti Idiologi, pemerintahan, budaya politik, sosiologi politik, perkembangan politik dan demokrasi, hubungannya dengan sistem politik dan partai politik, serta pelembagaan.

Pada umumnya berbagai kajian tentang politik di negara-negara berkembang cenderung sangat terkait dengan pembahasan tentang berbagai masalah spesifik seperti demokratisasi, idiologi, dan sejumlah kajian baru tentang sistem partai dan pelembagaan (Randall, 1998).

Berkaitan dengan hal ini berbagai kajian yang dilakukan oleh

Randall dan Svasand (Randall dan Svasand, 2002).

Mainwaring dan Timothy, Sachsenroder dan Fring serta Mainwaring misalnya, menunjukkan berkembangnya perhatian tentang kajian partai politik, khususnya di negara-negara demokrasi baru.

Seleksi Kandidat

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik (Gaffar, 1999). Kedua, Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Prosedur untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon dalam rekrutmen politik diuraikan pada empat kriteria yaitu selektorat, pencalonan,

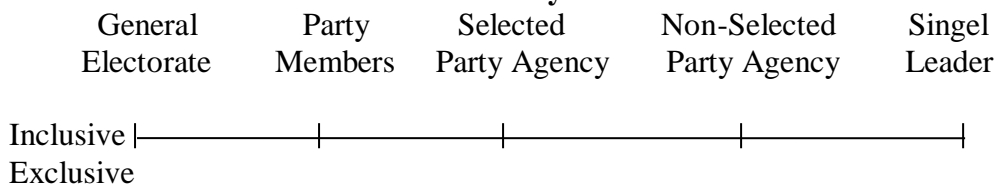
desentralisasi, dan voting versus penunjukan (Hazan & Rahat, 2006).

Selektorat

Selektorat merupakan badan yang menyeleksi calon, hal ini merupakan aktor perantara penting dalam proses perekrutan selektorat dapat dapat beranggotakan satu orang atau banyak orang hingga seluruh pemilih dalam suatu bangsa tertentu (Heinrich and Cotta, Maurizio, 2000).

Reuven Hazan menggambarkan lima jenis proses seleksi kandidat antara dua kontinum inklusif di satu sisi dan eksklusif di sisi yang lain. Kelima proses seleksi kandidat tersebut adalah *pertama*; seleksi yang dilakukan oleh pemilih (*voters*), *kedua*; seleksi yang dilakukan oleh anggota partai, *ketiga*; seleksi yang dilakukan oleh delegasi partai, *keempat*; seleksi oleh elite partai, dan *kelima*; seleksi oleh pimpinan partai.

Gambar 1 Party Selectorates



Source: Based on Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, "Candidate Selection," in Richard Katz and William Crotty, eds., *Handbook of Party Politics* (London: Sage, 2006), 109–121.

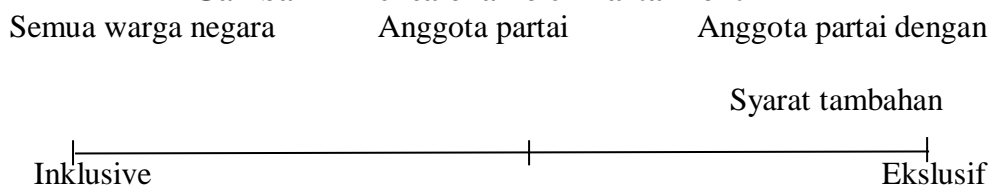
Atas dasar perspektif teori Hazan secara umum dapat dibedakan dua kecenderungan pola rekrutmen, yakni inklusif dan eksklusif. Rekrutmen inklusif melibatkan publik dan atau pemilih, sedangkan rekrutmen eksklusif hanya melibatkan anggota, pengurus, dan pimpinan partai. Dalam upaya melembagakan sistem rekrutmen yang terbuka dan demokratis, maka seleksi calon pejabat publik semestinya melibatkan publik, selain keterlibatan para anggota, pengurus, pimpinan partai. Ketika selektorat adalah lembaga partai, kita menemukan pada tengah kontinum. Di dalam partai, ukuran relatif

masing-masing lembaga adalah tanda inklusivitasnya. Ujung ekstrim dari kutub eksklusif didefinisikan oleh selektorat yang terdiri dari satu individu.

Pencalonan

Pencalonan membahas pertanyaan tentang siapa yang dapat menampilkan dirinya sebagai calon dari partai tertentu. Sekali lagi dapat ditempatkan sebuah kontinum dari inklusif ke eksklusif. Pada salah satu ujung, kutub inklusif, setiap pemilih berhak untuk tampil sebagai calon partai. Pada kutub eksklusif ditemukan serangkaian syarat ketat.

Gambar 2 Pencalonan oleh Partai Politik



Sumber : Rahat dan Hazan (2001)

Desentralisasi

Metode seleksi partai dapat dilihat sebagai desentralisasi dalam dua pengertian. Desentralisasi bisa bersifat teritorial, yakni ketika selektorat partai lokal mencalonkan calon partai. Misalnya seorang pemimpin lokal, komite cabang partai, atau semua anggota partai atau pemilih disuatu daerah pemilihan. Desentralisasi metode seleksi juga bersifat fungsional, yang memastikan keterwakilan bagi perwakilan kelompok seperti serikat buruh, serikat perempuan atau minoritas.

Kesalahan umum dalam studi yang membahas metode seleksi adalah menganggap desentralisasi dan inklusivitas dan sentralisasi serta eksklusivitas secara konseptual sama, atau setidaknya menggambarkan dimensi metode seleksi calon yang sama. Namun secara analitis keduanya berbeda. Desentralisasi bisa berarti bahwa kontrol atas seleksi calon beralih dari oligarki nasional ke oligarki lokal. Sebagai contoh, jika selektorat terdesentralisasikan dari konferensi partai nasional yang terdiri atas

ribuan peserta ke sepuluh komite lokal yang masing-masing terdiri dari beberapa orang komite lokal yang masing-masing terdiri dari beberapa orang aktivis dan pemimpin, secara keseluruhan selektorat telah terdesentralisasi, namun belum menjadi lebih inklusif dan sebenarnya telah menjadi lebih eksklusif.

Voting versus penunjukan

Biasanya terjadi bahwa dalam selektorat yang lebih kecil dan lebih eksklusif calon diangkat, sementara selektorat besar biasanya melakukan voting untuk memilih calon mereka. Namun, sistem pemungutan suara secara teoritis dapat digunakan dalam selektorat yang terdiri dari dua orang atau lebih, dan penunjukan dapat dilakukan dalam lembaga yang terdiri dari puluhan orang. Ketika proses seleksi mencakup suatu prosedur yang dengannya voting menentukan apakah seseorang dinyatakan sebagai calon partai dalam pemilu, dan/ atau posisinya pada daftar, kita dihadapkan dengan prosedur pemungutan suara.

Metode Seleksi PKS Pada Pemilukada di kota Tasikmalaya Tahun 2017

Seleksi kandidat merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan oleh partai politik sebelum pemilu dilaksanakan. Setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melakukan seleksi, hal ini dijalankan sesuai dengan kepentingan partai politik. Ada partai politik yang melakukan proses seleksi kandidat dengan melalui pemilihan pendahuluan. Dengan tujuan sebagai sarana pemersatu elit di partai politik (Vallve dan Muller: 2015) Alasan lain yaitu untuk mendapatkan efek seleksi (Aragón, 2014).

Sementara ini ada partai yang menyelenggarakan seleksi kandidat melalui pemilihan pendahuluan, akan tetapi ada juga partai politik yang tidak melakukannya, tetapi masih mempertahankan pola penunjukan oleh elit di tingkat pusat. Pola ini masih terjadi di Indonesia pada partai politik paska reformasi. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pola seleksi yang dilakukan oleh PKS pada saat sebelum Pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017. Seleksi bakal calon kepala daerah

yang dilakukan oleh PKS pada Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2017 terbagi atas tiga tahap antara lain:

Tahap Pertama. Pada tahap pertama seleksi dilakukan di DPD PKS dengan melaksanakan pemilu internal/pemilu raya yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD), yang diikuti 300 kader inti yang tergabung dalam Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (UPPA). Setiap UPPA yang terdiri atas 7-8 orang melaksanakan musyawarah guna menentukan tiga orang dari internal PKS. Seleksi ini terlihat demokratis karena merupakan hasil mufakat anggota inti. Dari tahap pertama ini terpilih tiga orang dengan suara tertinggi yaitu, H. Heri Ahmadi, Yadi Mulyadi dan Tono Wartono. Seleksi di daerah tidak dipengaruhi oleh pimpinan partai ditingkat lokal, dan oleh kader yang lain. Mereka diminta untuk melihat secara jernih kader yang mumpuni dan menonjol di PKS. Tiga orang yang terpilih direkomendasikan oleh DPD ke

DPW PKS Jawa Barat (Agus S. 2018).

Tahap Kedua. Pada tahap kedua seleksi dilaksanakan di DPW oleh Tim penjaringan dan penyaringan (TPP DPW), tim memanggil tiga orang yang direkomendasikan oleh DPD. TPP DPW melakukan wawancara terhadap tiga orang bakal calon terkait dengan kesiapan mental dan kekuatan financial pendukung bila maju sebagai calon dari PKS. Di DPW ke tiga nama tersebut digodok oleh TIM TPP DPW dan hasilnya diserahkan ke Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) dan hasil dari rapat musyawarah DPTW merekomendasikan dua orang yaitu H. Heri Ahmadi dan Yadi Mulyadi di kirim ke Desk Pilkada pusat. Hanya saja tidak jelas bagaimana seleksi yang dilakukannya. Di sinilah bagaimana seleksi terlihat gelap, tanpa ada kejelasan unsur utama dalam seleksi. Analisisnya DPW mengajukan dua nama adalah H. Heri Ahmadi merupakan kader yang mendapatkan suara tertinggi, sedangkan Yadi Mulyadi kedua tertinggi pada saat pemilu internal

dilakukan di daerah. Nampaknya DPW lebih condong mengambil keputusan aman sesuai dengan urutan perolehan suara pada pemilu internal di daerah.

Tahap ketiga. Pada tahap ketiga Desk Pilkada memanggil dua orang yang direkomendasikan oleh DPW untuk melaksanakan wawancara, wawancara terkait dengan kesiapan mental dan kemampuan financial. Hasilnya adalah H. Heri Ahmadi menjadi calon internal PKS pada Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2017. Di tingkat DPP rekrutmen terlihat gelap, karena diambil secara tertutup. Analisisnya adalah, DPP mendengarkan masukan dari DPW terkait calon yang lebih diutamakan untuk direkomendasikan oleh DPP yaitu H. Heri Ahmadi. Hasil DPP ini kemudian dikirim kembali ke DPW karena ini calon internal maka DPW yang menandatangani SK pencalonan kader internal. Selanjutnya DPD PKS wajib mensosialisasikan calon tersebut ke koalisi partai di daerah.

Proses seleksi yang dilakukan oleh PKS, pada tataran DPD proses

rekrutmen sangat demokratis karena melalui proses pemilu internal yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Tiga nama terbanyak muncul pada pemilu internal yang diajukan ke DPW. Akan tetapi pada tataran DPW dan DPP tidak dijelaskan kriteria dipilihnya bakal calon, karena tidak ada mekanisme yang jelas pada proses seleksinya, sehingga semua hal bisa terjadi di sana.

Secara nyata dapat dijelaskan terpilihnya H. Heri Ahmadi dikarenakan berdasarkan perolehan suara terbanyak yaitu 36 suara lebih banyak dari Yadi Mulyadi 23 suara dan Tono Wartono 22 suara. Akan tetapi mengapa dalam aturan DPP dijelaskan bahwa DPW mengirimkan 3 nama terbaik ke DPW dan DPW mengirimkan 2 nama terbaik ke DPP, artinya masih ada celah untuk nama-nama yang bukan no urut 1 bisa menjadi kandidat yang mendapatkan rekomendasi DPP. Walaupun DPP menyampaikan bahwa dengan mengirimkan lebih dari satu calon maka calon yang lain sebagai bahan perbandingan. Tetapi dapat dikatakan di sini bahwa

argumentasi DPW dan DPP memilih H. Heri Ahmadi sebagai calon dengan suara tertinggi tidak bisa dijelaskan sebagai hasil seleksi di DPW dan DPP. Karena pada tingkat DPW dan DPP tidak dijelaskan kriteria seleksinya. Faktor yang menjelaskan adalah adanya faktor lain yang dapat ikut mempengaruhi mengapa H. Heri Ahmadi terpilih oleh DPP.

Analisis yang dapat menjelaskan adalah, H. Heri Ahmadi merupakan mantan ketua DPD PKS periode 2005-2010. Setelah berkiprah di DPD PKS Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi dipindahkan ke DPW dan saat ini Heri menjabat sebagai ketua Dewan Dakwah wilayah lima Priangan Timur Jawa Barat, dengan tugas untuk membina kader PKS di wilayah Pringan Timur termasuk Kota Tasikmalaya. Di sinilah H. Heri Ahmadi mulai memiliki kedekatan dengan Ketua DPW PKS Jawa Barat. Sehingga tidak salah bila DPW mengajukan nama H. Heri Ahmadi ke DPP.

Bagaimana dengan di DPP, di sini dapat dijelaskan, terdapat

kedekatan antara Ustad Tate yang merupakan ketua Wilayah Dakwah Jawa Barat, Jakarta dan Banten yang bertugas sama dengan H. Heri Ahmadi untuk membina di wilayah Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Selain itu H. Heri Ahmadi dekat dengan Presiden PKS Sohibul Iman yang merupakan kelahiran Kota Tasikmalaya. Presiden PKS dekat dengan H. Heri Ahmadi dibenarkan juga oleh ketua DPD PKS` Kota Tasikmalaya (Agus, 2019). Beberapa kali Presiden PKS datang ke DPD selalu ditemani oleh H. Heri Ahmadi.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan, terdapat faktor lain yang mendorong terpilihnya H. Heri Ahmadi sebagai bakal calon internal PKS. faktor ini tidak lepas dari kedekatan H. Heri Ahmadi dengan ketua DPW PKS dan Presiden PKS. Artinya ada unsur subjektifitas yang muncul atas keterpilihan H. Heri Ahmadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola seleksi di tubuh PKS secara prosedural terlihat demokratis di tataran lokal, akan tetapi pada tataran DPW dan DPP unsur demokratis tidak terlihat

karena kriteria seleksi yang tidak ada sehingga unsur subjektifitaslah yang muncul atas keterpilihan H. Heri Ahmadi. Secara umum, proses kandidasi di PKS masih diwarnai oleh praktek "politik di belakang layar" (*behind-the-scenes politics*). Bagaimana dengan gambaran tentang proses seleksi bila dihubungkan dengan metode seleksi Hazan (2006). Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Selektorat. Di DPD terdapat selektorat yang disebut dengan tim pemenangan pemilu daerah (TPPD), selektorat ini berjumlah 12 orang yang diketuai oleh ketua DPD PKS. Mereka dipilih oleh ketua DPD PKS dan menjalankan kegiatan pemira/pemilu internal secara profesional, tidak memihak pada calon mana pun. TPPD hanya menjalankan proses pemilu internal, sedangkan yang memilih adalah seluruh kader inti di PKS. Jadi bukan TPPD yang memilih calon, mereka hanya penyelenggara pemilu internal saja. Artinya seluruh anggota inti partai merupakan selektorat di tingkat lokal yang sesungguhnya, jika melihat gambar terletak di party

members. Akan tetapi pada tingkat pusat ternyata peran penting ada pada elit partai politik yang menentukan bakal calon yang mendapatkan rekomendasi, tanpa dijelaskan kriteria seleksi.

Untuk mekanisme kandidasi di level DPW dan DPP, tahapan penetapan calon masih bersifat tertutup. Di tahapan ini, anggota parpol dan masyarakat umum tidak dapat mengikuti proses yang ada. Hampir sama dengan Pilpres dan Pileg, tahapan penetapan calon untuk pilkada masih menjadi ruang gelap. Dan memungkinkan faktor lain

masuk untuk mempengaruhi proses kandidasi. Seperti dalam Sukmajati. Terkadang pada sistem oligarki, Keputusan-keputusan dilakukan secara tertutup, *smoke filled rooms*, tanpa melibatkan partisipasi kader dan konstituen (Burhanudin, 2019). Selektorat yang ada dalam PKS pada tataran lokal melalui pemilihan oleh anggota partai, sedangkan pada tingkat wilayah dan pusat oleh selektorat DPP. Inilah badan inti yang memilih dan memberikan rekomendasi pada bakal calon kepala daerah.

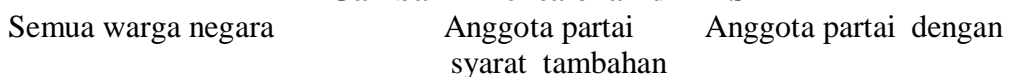
Gambar 3 Party Selectorates PKS



Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2019

Pencalonan, yang dimaksud dapat menampilkan dirinya sebagai pencalonan di sini adalah siapa yang calon dari partai tertentu.

Gambar 4 Pencalonan di PKS



Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2019

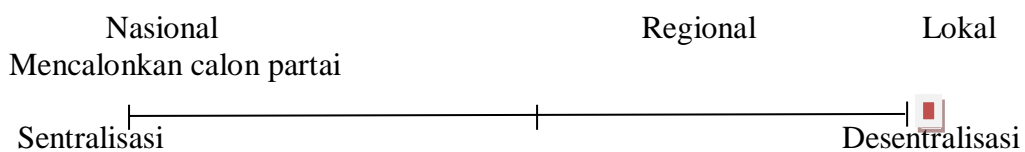
PKS membebaskan kepada seluruh kader inti untuk memilih siapa calon yang layak dipilih oleh mereka, hanya saja batasan kader

yang dipilih adalah minimal kader inti. Disampaikan oleh tim selektorat bahwa proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan jenjang keanggotaan dan kapabilitas dan profesionalitas. Kader inti di PKS terdiri atas anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli dan anggota purna, merupakan kader yang sudah lama dan sudah mengikuti jenjang pelatihan hingga tingkat lanjutan, dan sudah memiliki pengalaman politik yang banyak. Model pencalonan di PKS diperuntukan untuk kader inti saja, artinya tidak semua kader atau anggota partai bisa ikut dicalonkan, dengan demikian, pencalonan hanya untuk anggota partai dengan syarat tambahan. Ini menunjukkan bahwa

pencalonan di PKS masuk pada kontinum eksklusif.

Desentralisasi. Dalam disertasi ini akan membahas desentralisasi teritorial, yaitu untuk melihat peran selektorat dalam mencalonkan calon partai. Di sini terlihat pada tataran lokal, PKS di daerah memiliki kewenangan luas dalam menjalankan proses pemilu internal, tanpa ada campur tangan dari pusat. Walaupun hasil akhirnya sangat ditentukan oleh pusat. Akan tetapi dengan diberikannya kebebasan dan independensi selektorat di daerah untuk menyelenggarakan pemilihan ini sudah menunjukkan derajat demokratis di internal partai dari segi pencalonan.

Gambar 5 Desentralisasi di PKS



Sumber: hasil olahan peneliti tahun 2019

Voting versus Penunjukan. Proses seleksi di daerah dilakukan PKS melalui pemilu internal, ini menunjukkan pola voting dalam penentuannya. Tiga kader yang

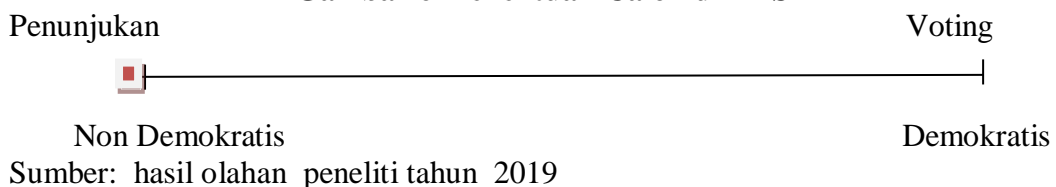
mendapatkan suara terbanyak akan dikirim ke DPW, sedangkan di DPW, TIM TPP DPW bekerja untuk menyeleksi dengan proses yang tidak begitu jelas karena dilakukan

tertutup, dan mengeluarkan rekomendasi dua orang yang dikirim ke DPP. Pada tingkat DPP, dua nama yang diajukan DPW digodok di Desk Pilkada, hasilnya diajukan ke DPP untuk diberikan rekomendasi. Dari hasil rapat DPP akhirnya memutuskan Hery Ahmadi yang

diberikan rekomendasi oleh DPP sebagai calon internal PKS.

Proses penentuan calon pada tingkat lokal melalui voting atau pemilu internal, sedangkan pada tingkat pusat proses penentuan melalui penunjukan.

Gambar 6 Penentuan Calon di PKS



Secara umum dapat dijelaskan, dari empat dimensi seleksi kandidat, ternyata hanya satu dimensi yang memiliki nilai demokratis yaitu desentralisasi di mana partai memberikan keleluasaan pada DPD untuk mencalonkan kandidat dari daerah. Pada tiga dimensi lainnya, selektorat, pencalonan dan penentuan calon tidak menunjukkan skala demokratis pada PKS. Pada selektorat walaupun dijelaskan seleksi oleh delegasi partai akan tetapi pada kenyataannya hanya dilakukan di DPD PKS, sedangkan pada DPW dan DPP PKS ternyata sangat dipengaruhi oleh elit partai. Pada pencalonan dapat

dijelaskan yang bisa menjadi kandidat hanyalah anggota partai dengan syarat tambahan, sedangkan pada penentuan calon adalah penunjukan dari DPP PKS.

Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kandidat PKS

Berdasarkan pada seleksi yang dilakukan oleh PKS, terpilihlah H. Heri Ahmadi sebagai kandidat berasal dari internal PKS. H. Heri Ahmadi mendapat mandat dari DPP PKS sebagai bakal calon wakil kepala daerah Kota Tasikmalaya dari internal partai. Akan tetapi pada langkah selanjutnya ternyata PKS tidak jadi mengusung H. Heri

Ahmadi dan surat rekomendasi diberikan pada pasangan H Dede dan dr Asep yang keduanya bukan berasal dari kader PKS. Di sini akan dijelaskan mengapa terjadi perubahan pengajuan kandidat oleh PKS dalam Pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017.

Pertama, H Heri Ahmadi tidak diterima oleh koalisi partai. Setelah resmi diusung oleh PKS, DPD PKS mencoba menjajal koalisi ke Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PAN untuk mencoba mengajukan nama H. Heri Ahmadi sebagai bakal calon wakil walikota. Ternyata Heri Ahmadi sulit diterima oleh koalisi partai, mereka tidak mau memasangkan antara H. Dede dan H. Heri Ahmadi. Ada kabar yang menyampaikan bahwa tidak dipilihnya H. Heri Ahmadi karena tidak memiliki nilai jual, dan nama Heri Ahmadi sendiri sempat diisukan sebagai anggota kelompok agama tertentu (Ahmadiyah), karena namanya yang hampir sama, jadi ada ketakutan kalau memaketkan H. Heri Ahmadi dengan siapa pun, maka tidak akan ada yang memilih, karena faktor nama (Nugraha, 2019).

Kedua, kuatnya *local stronge man*, faktor utama tidak diterimnya kader PKS dalam koalisi adalah karena faktor kuatnya H Aming dalam membentuk pasangan H. Dede - dr Asep, selain itu H Aming telah melaksanakan empat kali lobi politik dalam menentukan bakal calon yang akan diusung koalisi. Para ketua partai koalisi (Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN) pernah empat kali bertemu dengan H Aming di Bank Mandiri Kota Tasikmalaya, di Hotel Mandalawangi Kota Tasikmalaya, di Rumah Makan Nyiur Tasikmalaya, dan di Bandung (Nugraha, 2019).

Dari pertemuan tersebut diperkuat lagi dengan adanya politik transaksional untuk terpilihnya H. Dede - dr Asep. Inilah faktor yang semakin menguatkan, terbentuknya pasangan H. Dede dan dr Asep. Dengan demikian secara tidak langsung menutup peluang terpilihnya kader PKS H. Heri Ahmadi menjadi bakal calon wakil walikota dalam koalisi tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah. *Pertama*, pola seleksi di tubuh PKS secara prosedural terlihat demokratis di tataran lokal (DPD), akan tetapi pada tataran DPW dan DPP unsur demokratis tidak terlihat karena kriteria seleksi yang tidak ada sehingga unsur subjektifitaslah yang muncul atas keterpilihan H. Heri Ahmadi. Secara umum, proses kandidasi di PKS masih diwarnai oleh praktek "politik di belakang layar" (*behind-the-scenes politics*). *Kedua*, Pola seleksi yang dilakukan oleh PKS dalam rekrutmen politik belum menunjukkan demokratisasi di internal partai politik secara keseluruhan. Dari empat dimensi metode seleksi hanya satu yang terpenuhi unsur demokratisnya, yaitu pada desentralisasi, sedangkan dimensi lainnya selektoratm pencalonan dan penentuan calon masih menunjukkan pada skala non demokratis. *Ketiga*, tidak terpilihnya kader internal PKS bukan disebabkan kader yang maju tidak berkualitas, akan tetapi kader internal PKS tidak dikehendaki oleh partai

koalisi. Selain itu tidak dipilihnya kader internal PKS sangat dipengaruhi oleh *local stronge man*, dengan kekuatan financial yang besar. Hal ini berimplikasi pada terpilihnya pasangan H Dede- dr. Asep oleh PKS.

Daftar Pustaka

- Bahkti, Ikrar Nusa dan Haris, Syamsuddin, Dkk. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan LIPI.
- Best, Heinrich and Cotta, Maurizio. (2000). ' *Elite transformation and modes of representtaion since the mid-nineteenth century: Some theoretical considerations*', in Best, Heinrich and Cotta, Maurizio (eds), *parliamentary Representatives in Europe 1848-2000*, Oxford university press.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Galagher, Michael and Michael Marsh (eds). (1988). "*Candidate Selection in Comparative perspective: The Secret garden Of Politics*, London: Sage.

- Hands, Gordon , Robert Michels and The Study of Political Parties. (1998). dalam *British Journal of Political Science*, Vol. 1, No. 5.
- Hazan, Reuven, Y and Pennings, Paul (Eds). (2001). “*Democratizing Candidate Selection: Causes and consequences*”, *special Issue of Party Politics* Reuven Hazan, Y and Pennings, Paul (Eds). (2001). “*Democratizing Candidate Selection: Causes and consequences*”, *special Issue of Party Politics*.
- Held, David (2006). *Models of Democracy*, Akbar Tanjung Institute, Jakarta.
- John W Creswell & Pianno Clark. 2007. *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks: Sage.
- Lidle, William,. (1970). *Ethnicity, Party and National Integrations: An Indonesian Case Study*, New Haven: Yale University Press.
- Mainwaring, Scott dan Scully, Timothy R. (1995). *Building Democratic Institutions: Party System in Latin America*, Standford: Standford University Press.
- Michels, Robert. (1984). *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta.
- Moisei, Ostrogorski. (1991). *Democracy and the organisation of political Parties*, (London: Macmillan,) lihat juga, Firman Noor, 2015, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di dekade Awal Reformasi*, Jakarta: LIPI.
- Muhtadi, Burhanudin. (2019). *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing.
- Norris, Pippa. (2006). “*Recruitment*”, dalam Richard S Katz & William Crotty, *HandBook of Party Politics*, London : Sage.
- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Rahat, Gideon, “*What Is Democratic Candidate Selection?*” dalam William P. Cross dan Richard S. Katz (eds.), Op.cit.
- Randall, Vickey. (1998). *Political Parties in the Third World*, London : Sage.
- Rauf, Maswardi. (2006). *Format Kepartaian dan Sistem Pemilu Masa depan*, Jurnal politik Volume 2 . Akbar Tanjung Institute No 2 Th 2006.
- Sachsenroder, Wolfgang dan Fring, Ulrike E. (eds). (1998). *Political Party Systems and Democratic Development in East and Southeast Asia: Volume I Southeast Asia*,

Aldorshot: Ashgate Publishing
Limited.

Scarrow, Susan E. (2006). “ *The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence Of Party-Based Politics*”, dalam Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, London: SAGE Publication.

Stefen, Wolinetz. (2004) *Party Systems and Party System Type* dalam Richard S Katz dan william Crotty (terj), *handbook of Party Politics*, London: Sage Publications.

Subekti, Valina Singka. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi, Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Obor.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.

Taylor, S.J., Bogdan, R., & De Vault, M.L (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (4th Ed). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Yin (2009) dalam Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, memilih Di Antara Lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar